IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK

Sry Iin Indirwan

**Prodi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.**

Emai : sryiinindirwan00@gmail.com

Abstrak

Tata kelola yang baik yang diusung oleh Bank Dunia dan UNDP masih belum memiliki kesepakatan yang pasti. Konsep ini lebih dimaknai sebagai solusi bagi terwujudnya kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Selanjutnya, Bank Dunia sebagai donor memberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun kapasitas kelembagaan dan pelatihan bagi pejabat publik untuk meningkatkan kompetensinya. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Good governance sebagai sebuah konsep menuai kritik dalam implementasinya, salah satu kritik yang diberikan adalah kurangnya kontrol dalam pelaksanaan good governance pada aktor-aktor pemerintahan. Tidak hanya itu penerapan good governance di suatu negara seringkali dipaksakan, padahal prinsip tersebut tidak sesuai dengan sistem pemerintahan, negara, budaya masyarakat yang ada. Dalam kasus Indonesia dalam hal implementasi Good Governance, masih banyak ditemukan permasalahan seperti reformasi birokrasi yang kurang baik, praktik KKN, tuntutan penerapan prinsip-prinsip good governance yang di antaranya tidak sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat Indonesia. masyarakat, dan partisipasinya masih rendah.

Kata Kunci : governance, good governance, implementation

PENDAHULUAN

Dewasa ini di negara kita, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. (Maryam 2016)

Good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut disebut sebagai administrasi pembangunan. Pada dasarnya, penerapan tata pemerintahan yang baik merupakan pelayan publik yang lebih baik kepada masyarakat, maka dari itu good governance ini sangat penting di terapkan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Manajemen pembangunan atau administrasi pembangunan menempatkan peran pemerintah sentral. Maka pemerintah menjadi (agen perubahan), dari suatu masyarakat (developing) dalam negara berkembang, khususnya pada wilayah daerah. (Sulaeman, Mustanir, and Muchtar 2019).

Good governance pada pencapaiannya wajib didukung sang public service menjadi orientasi pada penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik sebagai bagian krusial pada pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. (Jamal, Mustanir, and Latif 2020)

Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena

pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. (Cahyadi 2017)

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat tersebut dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. (Mustanir and Abadi 2017)

Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

Konsep Implementasi

Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster Wahab, (2005) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out (menyediakan untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to” (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). (Mustanir and Darmiah 2016)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

1. Komunikasi (Communications) Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung

jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya (Resources) Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.
3. Sikap (Disposition atau attitudes) Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. (Mustanir and Jusman 2016)

2. Konsep Dasar Good Governance

Pemerintah atau “Government” dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai “The governing body of nation, state, city, etc.” Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “governance” yaitu “the act, fact, manner of governing”, yaitu yang berarti “tindakan, fakta, pola, dan sikap atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan”. Dengan demikian governance adalah suatu kegiatan atau proses, sebagaimana diungkapkan dengan Kooiman (Sedarmayanti 2012:2) bahwa governance lebih merupakan suatu rangkaian proses dari interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. (Nurimansyah et al. 2020)

United Nations Development Program (UNDP) (Kasemin 2015:33) good governance yaitu “the exercise of political, economic, and administrative authority to

manage a nation's affair at all level's" atau jika diartikan yang berarti governance adalah suatu pelaksanaan pada aspek politik (dalam pembuatan regulasi atau kebijakan), ekonomi (dalam pembuatan keputusan akan sumber daya ekonomi), dan otoritas administratif (dalam penerapan kebijakan) dalam mengelola urusan negara, serta sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. (Nurimansyah et al. 2020)

Menurut Mardiasmo (1999 : 18) good governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatnya sebagai kekuatan penyeimbang negara. (Cahyadi 2017)

3. Prinsip – prinsip Good Governance

Menurut UNDP (United Nation Development Program) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai berikut (Mulyawan, 2009: 20-23) (Nurimansyah et al. 2020)

- a. Partisipasi Setiap orang atau warga negara harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b. Aturan Hukum (Rule of Law) Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia

c. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh orang-orang yang membutuhkannya, serta informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

d. Daya tanggap (Responsiveness) Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).

e. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) Pemerintah yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.

f. Berkeadilan (Equity) Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk

g. Efektifitas dan Efisiensi Setiap proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yg benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

h. Akuntabilitas Para pengambil keputusan (decision makers) dalam organisasi sektor pelayanan, dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders). Pertanggung jawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.

i. Bervisi Strategis Para

Para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultur, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

j. Saling Keterkaitan

Bahwa keseluruhan ciri good governance tersebut di atas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri.

Government and society have an important role in making breakthrough to improve suitable conditions for people's needs. One of relevant ways to review a condition of rural environment is by applying Transect approach. It is expected to create a village development planning system which is participative in a process of managing existing resources especially in the rural area. (Mustanir, Ali, et al. 2020)

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2007:4-5). (Donald 1984)

Adisasmita dalam (Sapri et al., 2019) mengemukakan jenis partisipasi terdiri (Mustanir, Latif, and Irwan 2019)

a. Partisipasi uang/harta benda yaitu partisipasi dalam memberikan harta benda atau uang.

b. Partisipasi tenaga yaitu memberikan sumbangsih tenaga fisik dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi keterampilan adalah memberikan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan.

c. Partisipasi ide pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan pikiran, pendapat yang konstruktif dalam memperlancar pelaksanaan program dan mengembangkannya.

d. Partisipasi didalam pengambilan kebijakan, dimana masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan pengambilan kebijakan yang ada kaitannya dengan kepentingan bersama.

S. Pradja (26: 2014) dalam menjelaskan pemimpin dan kepemimpinan, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, di antaranya: pertama, kekuasaan dan kewenangan, yaitu kemampuan untuk bertindak bagi seorang pemimpin untuk menggerakkan bawahannya agar mengikuti kehendaknya dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Kedua, kewibawaan, yaitu berbagai keunggulan yang dimiliki seorang pemimpin, sehingga membedakan dengan yang di pimpinnya, dan dengan keunggulan tersebut, orang lain patuh dan bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang di kehendaknya. Ketiga, kemampuan, yaitu keseluruhan daya, baik berupa keterampilan sosial maupun keterampilan teknis yang melebihi orang lain. (Mustanir and Jaya 2016)

Perencanaan pembangunan sendiri merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan. (Mustanir and Yasin 2018)

Throughout the preliminary observation conducted in Kanyuara showed that Participatory approach in planning through the mechanism of deliberation of development plan remains rhetoric. Development planning is still dominated by

government policy, because people, especially ethnic group of Towani Tolotang still has very minimal involvement. (Mustanir, Abadi, and A. 2017)

For the indicators are both the concern, according to [9] in his book entitled “the Pathology of the Bureaucracy” states that justice is a behavior that does not discriminate who who are faced. (Mustanir, Jermisittiparsert, et al. 2020)

KESIMPULAN

Good governance pada pencapaiannya wajib didukung sang public service menjadi orientasi pada penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik sebagai bagian krusial pada pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Pemerintah membangun suasana kompetitif dalam memberikan pelayanan; Pemerintah berorientasi pada kebutuhan pasar, bukan birokrasi; Pemerintahan desentralisasi dan lebih proaktif. (Jamal, Mustanir, and Latif 2020)

Ada 5 aspek fundamental pelayanan publik yang paling signifikan buat diterapkan dalam instansi atau forum pemerintah, yaitu: Function (fungsi) Aparatur pelayanan publik menggunakan tugas utama dan fungsi yang inheren dalam dirinya wajib melakukan kinerja sebaik forum atau instansi pemerintah sebagai kunci primer pada pelayanan. Pelayanan yang baik, akan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Sebaik- baiknya pelayanan merupakan kepuasan terhadap aspek yang dilayani dan berorientasi dalam kebutuhan dan kepentingan warga dan memberikan secara penuh pada warga , baiknya menjadi bagian tanggung jawabnya. (Jamal, Mustanir, and Latif 2020)

REFERENSI

- Cahyadi, Arif. 2017. "PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya)." *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3(2).
- Donald. 1984. "Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi Indikator Dan Implementasinya." *Book*: 22.
[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter%20I.pdf).
- Jamal, Yenni, Ahmad Mustanir, and Adam Latif. 2020. "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciro Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8(3): 207–12.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* VI(1): 1–18.
- Mustanir, Ahmad, Kittisak Jermisittiparsert, et al. 2020. "Village Head Leadership and Bureaucratic Model Towards Good Governance in Sidenreng Rappang."
- Mustanir, Ahmad, and Partisan Abadi. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 5(2): 247–61. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986>
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636>.
- Mustanir, Ahmad, Partisan Abadi, and Nasri A. 2017. "Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan." 84(*Iconeg* 2016): 356–59.

- Mustanir, Ahmad, Akhwan Ali, Akhmad Yasin, and Budiman Budiman. 2020. "Transect on Participatory Development Planning in Sidenreng Rappang Regency." : 250–54.
- Mustanir, Ahmad, and Darmiah Darmiah. 2016. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 4(2): 225–38. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>.
- Mustanir, Ahmad, and Irfan Jaya. 2016. "Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 4(1): 84–97. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2741#%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/430>.
- Mustanir, Ahmad, and Jusman. 2016. "Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Ilmiah Akmen* 13(3): 542–58. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/69%0Ahttps://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/issue/view/6>.
- Mustanir, Ahmad, Adam Latif, and Irwan Irwan. 2019. "Analisis Kepemimpinan Terhadap Optimalisasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di Enrekang." *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)* 5(2): 1–20. journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp.
- Mustanir, Ahmad, and Akhmad Yasin. 2018. "Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif." 8(2): 21–31.

Nurimansyah, Muwaffiq, R Misriah Ariyani, Sulawesi Selatan, and Jawa Barat. 2020.

“Implementasi Good Governance Dalam.” 2(2): 114–27.

Sulaeman, Zhilviana, Ahmad Mustanir, and Andi Ilham Muchtar. 2019. “Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan

Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.” *PRAJA: Jurnal Ilmiah*

Pemerintahan 7(3): 88–92.